

BERHARAP KEADILAN DALAM MEMBUAT ATURAN

Hotel Diminta Buka Tapi Jalan Ditutup

YOGYA (KR) - Hotel menjadi salah satu usaha paling terpuruk di masa pandemi. Terlebih dengan adanya PPKM. Hotel tidak memiliki keleluasaan bergerak.

General Manager Hotel Grand Keisha, Ibnu Novel Hafidz mengatakan, dalam aturan PPKM hotel diperkenankan buka, karenanya tanggung jawab hotel tetap ada dan tidak mendapatkan bantuan. Misalnya, tidak ada subsidi listrik.

"Tapi dari mana hotel bisa mendapatkan uang untuk membayar listrik jika hotel tidak ada tamunya? Bagaimana hotel bisa mendapatkan tamu jika jalan di depan hotel ditutup? Belum lagi un-

tuk membayar gaji karyawan, membayar bunga bank, membayar biaya tes swab karyawan secara berkala, dan lain sebagainya," kata Novel kepada KR, Jumat (23/7).

Dikatakan, di masa pandemi okupansi hotel mengalami penurunan sangat besar. "Dalam kondisi normal sebelum pandemi, okupansi kami berada antara 65 % sampai 73 % setiap tahunnya," jelas Novel.

Tapi saat pandemi hanya 30 %, dan dengan adanya PPKM ini okupansi turun ke titik nadir yaitu di kisaran 3 % sampai 5 %. "Okupansi tersebut dibarengi harga kamar yang juga turun drastis. Ra-



KR-Istimewa

Ibnu Novel Hafidz ta-rata harga kamar di Yogya turun 40 % hingga 70 %," katanya.

Menurut Novel, di masa PPKM ini masih ada tamu menginap, meski jumlahnya tidak banyak dan hasilnya

belum bisa menutup biaya operasional. Tapi dengan kondisi jalan ditutup membuat akses tamu ke hotel mengalami kesulitan, dan tamu memilih urung menginap di hotel.

"Saat *owner* kami bertanya, bagaimana strategi kami? Maka kami menjabarkannya, akan memperbanyak sedekah. Insya Allah, sedekah itu yang tetap akan memperlancar rejeki kami, termasuk dalam rejeki adalah kesehatan," katanya.

Terkait ditutupnya tempat wisata di Yogya, Novel mengatakan, tamu hotel tidak semua memiliki tujuan berwisata. Ada yang bertujuan bisnis dan pekerjaan, ada

pula yang bertujuan untuk acara keluarga. Jadi ketika tempat wisata ditutup, tamu hotel masih ada. Namun ketatnya peraturan membuat jumlah tamu turun drastis.

Alternatif yang bisa dilakukan para pelaku usaha, menurut Novel hanya bertahan, melakukan serangkaian efisiensi. Beberapa usaha sudah memilih menutup bisnisnya.

Transformasi digital, lanjutnya, menjadi alternatif paling masuk akal. Beberapa usaha memang bisa memanfaatkannya dengan maksimal, tapi sayangnya sebagian masyarakat kita masih terkendala dengan aksesnya.

Novel berharap keadilan dan ketegasan pemerintah dalam membuat aturan. Jika memang kondisi hotel tidak bisa dibuka dengan sewajarnya, mengapa dalam PPKM ini tidak diberikan aturan bahwa hotel harus tutup, dan berikan subsidi, misalnya listrik, pembayaran BPJS dan lainnya. "Ini lebih jelas dibandingkan membiarkan hotel buka dengan segala kewajibannya, tapi akses jalan ditutup," katanya.

Pihaknya juga mengimbau agar para pelaku usaha hotel dapat memberikan data yang jelas meski data itu tidak menyenangkan, terutama data okupansi masing-

masing hotel. Banyak beredar data okupansi hotel di Yogya sudah mencapai 50 %. Mungkin tujuannya agar *image* hotelnya tetap laris atau itu bagian dari strategi bisnisnya.

"Tapi apa gunanya data jika tidak benar? Data ini menjadi variabel bagi pemerintah untuk membuat keputusan. Jika datanya tidak sesuai kenyataan, maka pengambilan keputusan pemerintah akan jauh juga dari kenyataan. Tapi jika data itu riil, meskipun sangat jelek, tapi keputusannya bisa tepat. Misalnya kemudian ada bantuan atau subsidi, atau kegiatan promosi yang tepat," katanya pula. (WAN)

PEMDA DIY SIAPKAN SHELTER BARU

Gratis dan Dipantau Dokter

YOGYA (KR) - Pemda DIY akan menambah fasilitas karantina atau shelter bagi kebutuhan isolasi pasien Covid-19 yang tidak memungkinkan melakukan isolasi mandiri (isoman) di rumah, pasien tanpa gejala maupun bergejala sedang yang telah dirujuk puskesmas di wilayahnya.

Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, pihaknya akan menambah fasilitas shelter Covid-19 yang berada di wilayah DIY melihat kondisi masih tingginya kasus Covid-19 dan banyaknya pasien Covid-19 yang memilih isoman di rumah, sehingga membuat kasus kematian pasien isoman cukup tinggi. Rencananya terdapat tujuh lokasi yang akan difungsikan sebagai shelter

Covid-19, di antaranya Wisma Mahasiswa UGM, Asrama Mahasiswa UNY dan Balai Diklat Kementerian PUPR Ngeksigondo.

"Masih banyak warga yang positif virus Korona enggan menjalani isolasi di shelter, sehingga memilih isoman di rumah. Banyaknya pasien Covid-19 yang memilih isoman di rumah ini akhirnya kurang termonitor dengan baik sehingga mencatat-

kan kasus kematian yang cukup tinggi di DIY," ujarnya, Sabtu (24/7).

Meskipun sudah ada setidaknya 55 shelter bagi isolasi pasien Covid-19 di DIY, pihaknya akan terus menambah beberapa shelter baru dengan total daya tampung mencapai sekitar 1.026 orang nantinya.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DIY Endang Patmintarsih menuturkan, terdapat 55 shelter Covid di DIY, 32 shelter di antaranya dikelola Dinsos DIY dengan kapasitas daya tampung mencapai 816 orang. Fasilitas shelter yang dikelola pemda ini diberikan secara gratis alias tidak dipungut biaya sama sekali dan penghu-

ninya mendapatkan perawatan dari tenaga kesehatan, tenaga pendamping dan terpantau dokter serta dijamin logistiknya.

"Kami mengelola 32 shelter yang tersebar di DIY yang bisa menampung 816 orang yang baru terisi sekitar 300 orang dan sudah banyak yang keluar masuk. Jika dilihat baru 19 shelter yang terisi. Kami juga gencar melakukan sosialisasi mendorong pasien isoman di rumah agar dirawat di shelter. Sebab isolasi di shelter Covid-19 lebih terpantau dan aman daripada di rumah di tengah penyebaran virus Korona varian Delta saat ini," pungkasnya. (Ira)

Polda DIY Salurkan 12 Ton Oksigen Cair



KR-Wahyu Priyanti

Pembajun secara simbolis menerima 12 ton oksigen cair dari Wakapolda DIY Brigjen Pol R Slamet Santoso SIK.

YOGYA (KR) - Polda DIY mendistribusikan 12 ton oksigen cair ke sejumlah rumah sakit besar di DIY, Sabtu (24/7) pagi. Pendistribusian oksigen yang merupakan bantuan dari Corporate Social Responsibility (CSR) sebuah perusahaan sawit tersebut, mendapatkan pengawalan dari polisi.

Wakapolda DIY Brigjen Pol R Slamet Santoso SIK

menyampaikan, 12 ton oksigen cair yang diterima Polda DIY, langsung didistribusikan kelima rumah sakit di Yogya. Kelima rumah sakit yang menangani pasien Covid-19 itu yakni RS Bethesda (2,5 ton), RS Panti Rapih (2,5 ton), RS PKU Muhammadiyah Yogya (2,5 ton), RS PKU Muhammadiyah Gamping (2,5 ton) dan RS Bhayangkara (2,5 ton). Se-

cara simbolis, bantuan diterima Kepala Dinas Kesehatan DIY, Pembajun Setyaningastutie di halaman Mapolda DIY.

"Apa yang kami lakukan adalah sebagai bentuk Polri yang Presisi, yaitu responsibilitas Polri dalam menghadapi pandemi Covid-19," tandasnya.

Sedangkan Pembajun menyampaikan terima kasih kepada Polda DIY dan perusahaan yang telah membantu oksigen.

"Setiap hari kebutuhan oksigen di seluruh rumah sakit yang menangani Covid-19 di DIY sebanyak 49 ton, dan setiap hari kami belum bisa memenuhi secara maksimal, sehingga bantuan oksigen ini sangat berarti bagi kami dan semoga bermanfaat bagi masyarakat Yogya," katanya. (Ayu)

KANTOR POS IKUT SALURKAN BANTUAN BERAS Distribusi BST Diperluas Hingga Kelurahan

YOGYA (KR) - Distribusi Bantuan Sosial Tunai (BST) kini tidak lagi dipusatkan di kantor pos kecamatan atau pusat, melainkan diperluas dengan distribusi langsung ke kelurahan. Upaya tersebut agar semakin memudahkan keluarga penerima manfaat serta meminimisir potensi kerumunan.

Kepala Kantor Pos Yogya Anton Chrisna Sutantyo menjelaskan, distribusi BST sekaligus bantuan beras kepada keluarga penerima manfaat di Kota Yogya sudah diawali di lima kelurahan pada Jumat (23/7) lalu. "Total ada 851 penerima dari lima titik tersebut. Selain BST juga ada beras 10 kilogram," jelasnya, Jumat (23/7).

Penyaluran BST untuk periode Mei-Juni atau tahap 14 dan 15 di Kota Yogya sebenarnya sudah dilakukan sejak 21 Juli. Namun demikian, penyaluran BST tidak lagi dipusatkan di tiga kantor pos yaitu di Kantor Pos Besar Yogya, Mujujumu dan Gondokusuman seperti penyaluran bantuan tahap sebelumnya, tetapi dilakukan dengan pola distribusi langsung di 45 kelurahan di Kota Yogya. "Kami mempertimbangkan bahwa saat ini masih dalam masa PPKM. Untuk menghindari kerumunan dan potensi munculnya kluster penularan baru, maka distribusi dilakukan langsung di kelurahan dengan penjadwalan," imbuhnya.

Di samping itu ada pembatasan jumlah penerima yang datang dalam satu waktu.

Setiap jam hanya diperuntukkan bagi 30 penerima, sehingga penyaluran BST yang biasanya sudah bisa diselesaikan dalam waktu tiga hari, maka kali ini baru bisa dituntaskan dalam waktu lima hari.

Terkait bantuan beras, diakuinya Kantor Pos mendapatkan tugas tambahan baru diperolehnya pada 20 Juli sehingga perlu ada upaya koordinasi dengan instansi lain sebelum disalurkan ke penerima. "Dengan persiapan penyaluran BST yang sudah berjalan dan kebutuhan koordinasi dengan instansi lain, maka penyaluran beras bantuan baru bisa dilakukan mulai 23 Juli," jelas Anton.

Untuk sementara, data penerima BST dan bantuan beras di Kota Yogya adalah 7.373 penerima manfaat atau sama dengan sebelumnya. Bagi penerima yang sudah memperoleh BST pada 21 dan 22 Juli tidak perlu khawatir kehilangan hak menerima bantuan beras dari pemerintah. Hal ini karena beras akan disalurkan bersamaan dengan penyaluran beras untuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Sedangkan untuk penerima BST tahap 14 dan 15, tetap memperoleh bantuan senilai Rp 300.000 perbulan sehingga setiap penerima akan memperoleh bantuan total Rp 600.000. Realisasi penyerapan BST pada tahap-tahap sebelumnya di Kota Yogya pun cukup tinggi yaitu mencapai 98 hingga 99 persen. (Dhi)

TANTANGAN BAGI PT

PPKM Bersamaan Penerimaan Maba

YOGYA (KR) - Pelaksanaan PPKM yang bersamaan dengan momentum penerimaan mahasiswa baru (maba) menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola perguruan tinggi (PT). Karena selain dituntut mengedepankan protokol kesehatan (prokes), mereka harus menyiapkan strategi khusus agar kuota yang sudah ditentukan bisa terpenuhi. Di antaranya dengan menggunakan model daring dalam penerimaan mahasiswa baru sampai mengoptimalkan keberadaan alumni yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

"Dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru kami sepakat untuk mengoptimalkan keberadaan teknologi atau secara online. Konsekuensi dari itu sejumlah persyaratan khusus, seperti surat keterangan tidak buta warna serta beberapa keterangan sehat yang lain wajib dilampirkan. Adapun untuk mengetahui kondisi fisik biasanya dilakukan wawancara lewat video call seperti tinggi badan.

Meski dilakukan secara daring tapi bisa dilakukan dengan baik. Karena calon mahasiswa baru sudah tahu, kalau sampai mereka memalsukan data bisa dikenakan sanksi," kata Ketua Sekolah Tinggi Maritim Yogya (Stimario) Dr Wegig Pratama, Sabtu (24/7).

Wegig mengungkapkan, tantangan yang harus dihadapi pengelola PT di masa pandemi Covid-19 cukup kompleks. Karena mereka tidak sekedar dituntut menghasilkan lulusan berkualitas dan siap di dunia kerja. Tapi juga dituntut menyiapkan fasilitas pembelajaran yang baik dengan tetap mengedepankan penerapan prokes. Untuk itu selain kerja keras, kreativitas keberadaan jejaring juga memiliki peran strategis dalam proses penerimaan mahasiswa baru.

Menyadari akan hal itu, untuk menarik minat calon mahasiswa baru selain lewat *Jogjaversitas* yang dimiliki Aptisi wilayah V, pihaknya juga melibatkan alumni dan taruna aktif. (Ria)

Kedaulatan Rakyat
EPAPER
www.kr.co.id

Berlangganan Scan Barcode

Harian Kedaulatan Rakyat juga hadir dalam format koran digital atau electronic paper (epaper). Sajian berita-berita Kedaulatan Rakyat dapat Anda nikmati melalui genggam tangan Anda. Sekarang.